

Modernisasi Pendidikan Islam, Demokratisasi Pendidik An Islam, dan Civil Society Islam Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam

Syifa Nabila¹, Maryani Utarie²

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: Syifbil05@gmail.com¹, maryaniutarie@gmail.com²

Abstract

This research discusses modernization, democratization and civil society in Islamic education as an effort to answer the challenges of contemporary developments. The modernization of Islamic education aims to adapt the education system to advances in science and technology, so that it remains relevant to the needs of the times. The democratization of Islamic education focuses on implementing democratic values such as justice, equality and participation in the education system, to overcome inequality and the marginalization of certain groups. Islamic education civil society involves the active role of the community in providing education through various organizations and non-governmental institutions. The philosophical basis of these three movements is the philosophy of Islamic education, which prioritizes the formation of people who are faithful, knowledgeable and devout, as well as adaptive to changing times. This research uses a qualitative approach with library methods to collect and analyze data from various sources. The research results show that modernization, democratization and civil society in Islamic education can improve the quality and relevance of Islamic education in the modern era.

Keywords: *Islamic education, Civil society, Educational equality.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang modernisasi, demokratisasi, dan civil society dalam pendidikan Islam sebagai upaya untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Modernisasi pendidikan Islam bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Demokratisasi pendidikan Islam berfokus pada penerapan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam sistem pendidikan, untuk mengatasi ketimpangan dan marginalisasi kelompok tertentu. Civil society pendidikan Islam melibatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah. Landasan filosofis dari ketiga gerakan ini adalah filsafat pendidikan Islam, yang mengutamakan pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan bertakwa, serta adaptif terhadap perubahan zaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi, demokratisasi, dan civil society dalam pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan Islam di era modern.

Kata Kunci : *pendidikan Islam, Civil society, Kesetaraan pendidikan.*

Article Info

Received date: 25 May 2024

Revised date: 30 May 2024

Accepted date: 10 June 2024

PENDAHULUAN

Modernisasi pendidikan Islam merupakan sebuah gerakan pembaharuan dalam dunia pendidikan Islam yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman modern. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai kritik yang ditujukan kepada pendidikan Islam, seperti dianggap statis, tidak relevan dengan kebutuhan zaman, dan tidak mampu menjawab tantangan modernitas. Ketika pendidikan Islam menjadi lebih modern, ini disebabkan oleh perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang, menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan Islam agar tidak tertinggal. Munculnya gerakan pembaharuan Islam yang menyerukan perlunya reinterpretasi ajaran Islam agar sesuai dengan konteks zaman modern. Kesadaran umat Islam akan pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara.

Demokratisasi pendidikan Islam merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang demokratis, yaitu pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap realitas pendidikan Islam yang masih timpang dan tidak demokratis. Munculnya demokratisasi pendidikan Islam antara lain, Ketidakadilan dan ketimpangan dalam akses pendidikan Islam, di mana

kelompok masyarakat tertentu masih terd marginalisasi dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, di mana masyarakat masih belum dilibatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pendidikan Islam. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai demokrasi untuk membangun masyarakat Islam yang adil, makmur, dan sejahtera.

Civil society pendidikan Islam adalah sebuah konsep yang mengacu pada peran masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Civil society pendidikan Islam meliputi berbagai organisasi dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan Islam, seperti pesantren, sekolah Islam, lembaga pendidikan nonformal, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Munculnya civil society pendidikan Islam antara lain, Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas. Keinginan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak mereka. Kesadaran akan pentingnya peran masyarakat sipil dalam membangun masyarakat Islam yang demokratis dan partisipatif.

Filsafat pendidikan Islam adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang hakikat, tujuan, dan metodologi pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menjadi landasan bagi modernisasi, demokratisasi, dan civil society pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain, Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Pendidikan Islam harus didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan harus sesuai dengan zaman dan lingkungan masyarakat saat ini. Pendidikan Islam haruslah bersifat komprehensif dan holistik, meliputi aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.

Modernisasi, demokratisasi, dan civil society pendidikan Islam merupakan tiga gerakan penting dalam dunia pendidikan Islam yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ketiga gerakan ini memiliki landasan yang kuat dalam filsafat pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Metode kepustakaan (studi pustaka) merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah keterbatasan sumber data dan waktu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Modernisasi Pendidikan Islam

Mayoritas orang di dunia ini tidak menganggap istilah modernisme sebagai sesuatu yang baru. Modernisasi secara definitif tidak menghasilkan standar baru; sebaliknya, standar tersebut sudah ada sebelumnya.

"Modernisasi" berasal dari kata "modern", yang berarti "baru" dan "mutakhir", serta "sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan perkembangan zaman." Kemudian Kata "modernisasi" ditambahkan dengan "sasi", yang berarti "modernisasi", yang berarti "proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman."

Kata modernisasi yang berasal dari kata "modern", atau "modernisme", seperti kata lainnya yang berasal dari Barat, telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang berarti "terbaru, mutakhir, atau bisa berarti sikap dan cara berfikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman".

Membentuk kembali, atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik adalah salah satu istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan modernisasi. Modernisasi juga dapat berarti perbaikan. Dalam bahasa Arab, sering disebut tajdid, yang berarti memperbaiki, dan pelakunya disebut Mujaddid, yang berarti orang yang melakukan pembaharuan.

Dalam dunia Islam, modernisasi atau pembaharuan berarti upaya atau tindakan untuk mengubah cara hidup umat Islam dari hal-hal yang sudah ada menjadi hal-hal baru yang dirancang untuk kepentingan manusia dan tetap sesuai dengan ajaran dasar yang disepakati oleh para ulama Islam. (Masrur, 2014)

Menurut Fazlur Rahman, konsep modernisasi pendidikan Islam mengacu pada perspektif kalangan ortodoks terhadap filsafat, terutama "sains-sains rasional", yang biasanya membawa kita ke

sejarah awal perkembangan dan sifat dari sistem pendidikan Islam beserta kandungannya mampu memberikan penilaian-penilaian yang cukup berharga terhadap perkembangan pendidikan Islam sejak zaman klasik hingga zaman modern baik segi kelebihan sekaligus kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan data laporan yang diberikan oleh Rahman ini, selain ia sendiri memberikan masukan-masukan bagi rekonstruksi pendidikan Islam di masa-masa sekarang. Dipertegas oleh Syariati (1992), bahwa sejarah akan mempunyai arti jika ia membicarakan tentang sejarah masa depan. Apabila sejarah tidak membantu mengetahui masa depan atau paling sedikit membantu mengetahui tentang manusia yang hidup hari ini atau manusia macam apa yang akan muncul di masa depan, maka ia akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, semua ilmu harus paling tidak mampu memahami manusia, tentang kehidupan manusia di masa depan dan ideal-ideal yang dimiliki baik oleh manusia kini maupun manusia masa depan. Memahami manusia di masa lalu harus menjadi titik tolak bagi kita memahami diri dan masa depan kita (Masannif, 2021).

Pengertian Demokratisasi Pendidikan Islam

Secara etimologi Bahasa Yunani berasal dari kata "demos", yang berarti rakyat, dan "kratos/kratein", yang berarti kekuasaan. "Rakyat berkuasa", atau pemerintahan yang dikuasai oleh rakyat, adalah ide dasar dari demokrasi. Selain itu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan yang dimiliki rakyat untuk rakyat. Namun, penerapan demokrasi di berbagai negara di seluruh dunia memiliki karakteristiknya sendiri, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat sebagai warga negara. Dalam Kamus Umum Indonesia-Prancis, kata "demokrasi" dapat diganti dengan istilah "demokrasi" atau "demokrasi", yang berarti "negara demokrasi" (Turham, 2022).

Prinsip kebebasan dan demokrasi memiliki dampak yang signifikan terhadap metode pendidikan dan pembelajaran Islam. Islam tidak membedakan orang Arab dari orang nonArab kecuali karena agama; agama ini menginginkan persamaan dan kesempatan yang sama untuk belajar, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Masjid dan institusi pendidikan dibuka untuk semua, tidak peduli posisi sosial siswa. Pelajaran di pendidikan Islam adalah gratis, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah pendidikan Islam. Siswa tidak terikat pada batas umur, ijazah, nilai ujian, atau peraturan khusus untuk diterima. Pintunya terbuka untuk belajar jika seseorang memiliki keinginan untuk belajar, minat dalam ilmu, dan keinginan untuk melakukan penelitian dan diskusi. Bahkan Islam mendorong untuk belajar, terutama bagi mereka yang berpembawaan cerdas (Assegaf, 2011).

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik Kebebasan disini meliputi:
 - a. Kebebasan berkarya Menurut al-Abrasyi, pendidik harus membiasakan siswanya untuk berpegang teguh pada kemampuan dirinya sendiri dan memberi mereka kebebasan untuk berpikir tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Hal ini dilakukan agar siswa dapat menentukan masa depan mereka sendiri secara mandiri berdasarkan kemampuan yang mereka miliki saat ini.
 - b. Kebebasan mengembangkan potensi Nurcholis Madjid membagi fitrah menjadi dua bagian. Fitrah algharizah adalah potensi dalam diri manusia yang dibawa dari lahir, termasuk akal, nafsu, dan hati nurani. Fitrah al-munazalah adalah potensi luar, yang membimbing dan mengarahkan fitrah al-gharizah untuk berkembang sesuai dengan fitrahnya melalui potensi pendidikan.
 - c. Kebebasan berpendapat Pendidik dituntut untuk menghargai pendapat peserta didik, peserta didik dituntut pula untuk menghargai pendapat pendidik dan sesama peserta didik, Karena menghargai pendapat merupakan salah satu kebutuhan dalam melaksanakan pendidikan.
2. Persamaan Terhadap Peserta didik dalam Pendidikan Islam Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk belajar.
3. Menurut Abuddin Nata, tidak ada perbedaan derajat atau martabat antara siswa dan guru karena pendidikan dilakukan di dalam ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari guru. Untuk menjamin kesempatan belajar yang sama bagi semua siswa, guru harus mengajarkan anak-anak yang tidak mampu bersama dengan yang mampu. 2.4 Dalam pendidikan Islam tidak ditemukan sistem sekolah unggul karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip demokrasi pendidikan Islam sebab bersifat diskriminasi terhadap peserta didik. Dalam pendidikan Islam yang ada adalah sistem pelayanan unggul, dimana setiap peserta didik

dibimbing mengembangkan potensinya secara maksimal.

4. Penghormatan Akan Martabat Individu dalam Pendidikan Islam Demokrasi sebagai penghormatan akan martabat orang lain, ma
5. ksudnya ialah seseorang akan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya sendiri. Secara historis prinsip penghormatan akan martabat ind ividu telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek pem bebasan kaum tertindas di Mekkah seperti memerdekakan budak. Dala m proses pendidikan, pendidik menghargai pendapat peserta didik, ta npa membedakan dari mana asalnya. Pendidik dapat menimbulkan sik ap saling menghargai pendapat diantara sesame peserta didik. Untuk menciptakan situasi dan kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar, guru harus bertanggung jawab untuk memberikan ganjaran atau hukuman kepada siswa mereka (Daulay, 2017)

Pengertian Civil Society Pendidikan Islam

Namun demikian, masyarakat sipil adalah istilah dan ide yang d ibahas dalam kehidupan sosial. Pembahasan lebih lanjut mengenai wacana Civil Society ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep masy arakat madani atau masyarakat sipil digunakan. Istilah "masyarakat madani" mengacu pada masyarakat yang mengutamakan prinsip-pr insip peradaban. Meskipun keduanya berbeda dalam awal sejarah d an wilayah geopolitis, secara tersirat keduanya memiliki arti yang sa ma. Ini dilakukan tanpa bermaksud mengubah substansi definisi ked ua istilah. Di Indonesia, istilah "masyarakat madani" berarti bahwa m asyarakat, atau warga, harus diberi kekuatan untuk mengimbangi da n mengendalikan kebijakan negara yang cenderung melemahkan wa rga negara.

Karena sejarah pergulatan di Eropa, sebagian besar tokoh kons ep ini adalah orang Eropa, seperti Cicero, Antonio Gramsci, dan de'T ocqueville. Jika diperlukan, istilah koinonia politike, yang digunakan Aristoteles, sebenarnya merupakan konsep awal dari masyarakat sipil. Selanjutnya, Adam Ferguson mengembangkan ide ini pada tahun 1 767 dengan mempertimbangkan keadaan politik dan sosial Skotland ia. Sampai perkembangan lebih lanjut yang dilakukan oleh banyak t okoh Eropa, termasuk Thomas Paine, yang menggunakan istilah Civi l Society sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi yang sa ma dengan negara, bahkan dianggap sebagai antitesis dari negara. Kata "madani" memiliki hubungan etimologis dan terminologis y ang kuat dengan Madinah dan dikaitkan dengan ide-ide Islami. Kota Madinah, yang menjadi ibu kota negara Muslim pertama, dikaitkan d engan para pemikir sebagai pengislaman masyarakat sipil dengan m emberikan nama keIslaman madani. Muhammad SAW dianggap sebaga i pembangun ideal dari Civil Society.

Konsep masyarakat madani, juga dikenal sebagai masyarakat sip il, dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Konsep ini membawa nilai- nilai keadilan, kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi setiap orang, dan perlindungan bagi kelompok minoritas. Dari perspektif in i, para pemikir Muslim melihat masyarakat Madinah sebagai contoh masyarakat ideal yang dibuat oleh produk Islam, yang dapat disandi ngkan dengan konsep masyarakat sipil ideal. Di Indonesia, istilah "masyarakat madani" lebih sering digunakan. Oleh karena itu, karakteristik masyarakat madani digunakan untuk menjelaskan beberapa ciri wacana ini. Untuk memulai wacana masya rakat madani, kita harus memahami kebutuhan fundamental. Salah s atu ciri masyarakat madani adalah:

- a. Adanya ruang publik bebas untuk mengemukakan pendapat dikenal sebagai ruang publik bebas.
- b. Salah satu organisasi yang dianggap demokratis berfungsi sebagai penegak wacana masyarakat madani.
- c. Toleransi menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati perbuatan orang lain.
- d. Untuk memastikan penegakan masyarakat madani, pluralisme harus dipahami dengan baik. Ini akan membantu Anda membuattatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Keadilan sosial dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan dan pembagian yang proporsional dari hak dan kewajiban setiap warga negara dalam semua aspek kehidupan, sehingga tidak ada monOpoli atau pemusatan satu kelompok masyarakat terhadap aspek tert entu dari kehidupan.⁶

SIMPULAN

Bahwa melalui pemahaman dan implementasi konsep-konsep tersebut, pendidikan Islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Modernisasi Pendidikan Islam membawa perubahan sikap dan mentalitas untuk menjaga relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman. Demokratisasi

Pendidikan Islam menekankan kesetaraan dan kesempatan belajar bagi semua peserta didik, sementara Civil Society Pendidikan Islam mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berbasis kebebasan berpendapat. Dengan demikian, Filsafat Pendidikan Islam memberikan landasan yang kuat untuk memperkuat sistem pendidikan Islam agar lebih berkualitas, inklusif, dan progresif sesuai dengan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Achmad Masrur. (2014). *Modernisasi Pendidikan Islam*. Jurnal. Malang
- Al-Musannif. (2021). *Perspektif Fazlur Rahman tentang Modernisasi Pendidikan Islam*. Turham. Pendidikan Demokrasi dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.
- Daulay Muhammad Roihan. (2017). *Demokrasi Pendidikan dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam*. Purwokerto
- Usman. (2016). *Civil Society Dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam* Referensi dari buku
- Abd Assegaf Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. PT. Raja Grafindo Persada. Padang